Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi
e-ISSN: 2775-9822
Vol. 7, No. 1, April 2026

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PATTIMURA

ANALYSIS OF NON-TAX STATE REVENUE REALIZATION AT THE PUBLIC SERVICE AGENCY OF PATTIMURA UNIVERSITY

Frans Very Anderias Sikteubun[1]*, Gladis Vinkan Molle[2], Barnesi Latuheru[3]
[1,2,3] Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Pattimura
Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, 97233, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, Indonesia.
*Email: fransvery@gmail.com

Abstrak
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah yang memperoleh pendapatan dari penyelenggaraan layanan publik berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaannya ke kas negara sebagai bagian dari PNBP. PNBP memiliki fungsi penting dalam mendukung pembiayaan operasional serta pengembangan institusi pemerintah. Perguruan tinggi negeri, khususnya yang berstatus Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU), merupakan salah satu kontributor PNBP. Di Universitas Pattimura, PNBP bersumber dari berbagai aktivitas, antara lain jasa layanan pendidikan, pengelolaan aset, kerja sama penelitian, serta layanan perbankan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, BLU didefinisikan sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan/atau jasa tanpa berorientasi pada keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi PNBP pada BLU Universitas Pattimura dengan menelaah tingkat pencapaian target, tren realisasi tahunan, serta kontribusi masing-masing sumber PNBP. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan pengelola keuangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya fluktuasi realisasi PNBP setiap tahun, namun secara umum memperlihatkan kecenderungan peningkatan, meskipun masih dihadapkan pada kendala tata kelola dan keterbatasan sistem pengelolaan aset.

Kata kunci: Penerimaan negara bukan pajak, BLU, Realisasi PNBP

Abstract
Non-Tax State Revenue (PNBP) stipulates that every government institution generating income from public service activities is required to remit such revenue to the state treasury as part of PNBP. PNBP plays a strategic role in supporting institutional operational financing and development. State universities, particularly those operating under the Public Service Agency (BLU) scheme, are among the contributors to PNBP. At Pattimura University, PNBP is derived from various activities, including educational service fees, asset management, research collaborations, and banking services. According to Government Regulation Number 23 of 2005, a BLU is defined as a government institution established to provide services to the public through the provision of goods and/or services without prioritizing profit generation. This study aims to analyze the realization of Non-Tax State Revenue (PNBP) at Pattimura University as a Public Service Agency by examining the level of target achievement, annual realization trends, and the contribution of each PNBP source. The research employs a quantitative descriptive method using documentation studies and interviews with relevant stakeholders, particularly financial management personnel. The findings indicate that PNBP realization at Pattimura University fluctuates annually but generally shows a positive trend, although challenges remain in governance practices and limitations in asset management and monitoring systems.

Keywords: *Non-Tax State Revenue, Public Service Agency, PNBP Realization*

Received	:	19th March 2026
Revised	:	20th April 2026
Accepted	:	30th April 2026
Published	:	6th May 2026
How to cite	:	Sitkeubun, F.V.A., Molle, G.V., & Latuheru, B. (2026). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Bukan Negara Pada Badan Layanan Umum Universitas Pattimura. *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, *7*(1), 1-10.
DOI	:	https://doi.org/10.30598/kupna.v7.i1.p1-10
License	:	This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Copyright	:	©2026 *Author(s)*

1. Pendahuluan

Pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas ditandai oleh efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, serta akuntabilitas, dengan penekanan utama pada kemampuan pelayanan tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang optimal bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Supryanto, 2023).

Keberhasilan pelayanan publik diukur dari tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang sekaligus mencerminkan kinerja lembaga penyedia layanan. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 serta diperkuat oleh Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa pemberian pelayanan merupakan kewajiban fundamental aparatur negara (Rusdi, 2021). Untuk mendukung pencapaian pelayanan publik yang optimal, pemerintah perlu mendorong pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, di mana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi salah satu sumber pembiayaan strategis selain pajak (Suparman, 2017).

PNBP merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari aktivitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta pemanfaatan kekayaan negara lainnya yang dipisahkan. Putri (2021) menjelaskan bahwa PNBP adalah pungutan yang dibayarkan oleh individu atau badan hukum atas manfaat langsung maupun tidak langsung dari jasa dan sumber daya yang disediakan negara, yang dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar pajak dan hibah. Definisi ini sejalan dengan Akbar (2023) yang menyatakan bahwa PNBP mencakup seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak bersumber dari pajak. Secara makro, PNBP memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar penopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Annisa, 2025).

Dalam sektor pendidikan tinggi, perguruan tinggi negeri yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian PNBP secara fleksibel guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan efisiensi operasional institusi. Namun, realisasi PNBP pada sektor ini cenderung mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika jumlah mahasiswa, kerja sama institusional, penelitian, serta pemanfaatan aset (Mutiso, 2015).

Sebagai entitas BLU, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan publik melalui fleksibilitas manajerial yang memungkinkan optimalisasi pendapatan dan reinvestasi untuk peningkatan layanan (Putri, 2024). BLU pendidikan memberikan ruang bagi universitas untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan, seperti layanan pendidikan, program pelatihan, kerja sama penelitian, dan pemanfaatan aset (Amary, 2020). Universitas Pattimura Ambon secara resmi memperoleh status BLU sejak Maret 2018, dengan sumber PNBP yang berasal dari jasa layanan pendidikan, kerja sama institusional, pemanfaatan aset, serta jasa layanan perbankan (Tribun Maluku).

Capaian kinerja pendapatan Universitas Pattimura selama periode 2021–2024 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan mencapai Rp161,66 miliar, lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp148,55 miliar, sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp13,10 miliar. Capaian positif tersebut berlanjut pada tahun 2022, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp161,18 miliar atau melebihi target sebesar Rp5,30 miliar. Peningkatan kinerja yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023, ketika realisasi pendapatan mencapai Rp170,76 miliar dari target Rp155,97 miliar, menghasilkan surplus sebesar Rp14,78 miliar. Kinerja terbaik dicatat pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar Rp188,38 miliar yang melampaui target Rp155,97

miliar dan menghasilkan surplus yang substansial sebesar Rp32,40 miliar. Secara keseluruhan, tren capaian pendapatan selama empat tahun tersebut mencerminkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan serta kemampuan institusi dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan. Surplus yang terus meningkat mengindikasikan adanya perbaikan dalam tata kelola, efektivitas program, dan penguatan potensi pendapatan dari tahun ke tahun.

Meskipun realisasi PNBP Universitas Pattimura selama empat tahun terakhir menunjukkan kinerja yang positif, analisis yang komprehensif tetap diperlukan. Hal ini disebabkan oleh besarnya kontribusi PNBP terhadap kemandirian dan keberlanjutan keuangan universitas sebagai BLU. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian, tren, dan struktur kontribusi PNBP Universitas Pattimura guna menilai efektivitas pengelolaannya serta mengidentifikasi peluang perbaikan dalam mendukung tata kelola keuangan yang berkelanjutan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori *Value For Money*

Teori *Value For Money* menjelaskan bagaimana pemerintah menggunakan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks dari PNBP, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien dan efektif untuk memastikan bahwa penerimaan yang dihasilkan dari sumber nonpajak dapat digunakan untuk meningkatkan dukungan publik dan menghambat pembangunan nasional. Teori Pengelolaan Keuangan Negara menjadi landasan konseptual utama dalam penelitian ini karena PNBP merupakan bagian dari keuangan negara yang harus dikelola sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. BLU Universitas Pattimura sebagai pengelola PNBP wajib merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan pendapatannya. Analisis realisasi PNBP dilakukan untuk menilai efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLU. Dengan demikian, Teori *Value For Money* memberikan dasar teoretis yang kuat untuk memahami dan menganalisis sejauh mana BLU Universitas Pattimura berhasil mencapai target penerimaan PNBP.

2.2 Teori *Signaling*

Teori *Signaling* menjelaskan bahwa teori ini sebagai pemberian sinyal berfokus pada dari informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial. Pemberian sinyal berfokus pada bagaimana informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat memengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial.Teori Signaling digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bahwa Realisasi PNBP bukan hanya sekadar angka pendapatan, tetapi juga sinyal penting tentang kinerja keuangan BLU Universitas Pattimura. Pencapaian target PNBP menunjukkan sinyal positif, sedangkan ketidaktercapaian memberikan sinyal negatif kepada pemangku kepentingan. Analisis realisasi PNBP membantu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Teori Signaling mendukung pemahaman bahwa laporan keuangan dan capaian pendapatan berfungsi membangun kepercayaan dan reputasi BLU. Dengan demikian, teori signaling menjadi landasan teoretis yang memperkuat analisis kinerja dan transparansi BLU Universitas Pattimura dalam mengelola PNBP.

2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah uang yang diterima negara yang bukan berasal dari pajak, Faisal Akbar, Laylan Syafina (2012). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah komponen APBN yang meliputi penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari penerimaan atau sumber penerimaan negara. Selain penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber uang negara yang harus dikuasai dan dimanfaatkan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas (Ditisrama, 2022). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, dan pengelolaan kekayaan negara lainnya yang dipisahkan. Menurut (Anisa, 2025) Peran strategis PNBP sebagai salah satu penopang APBN merupakan hal yang pasti. Bersama dengan jenis penerimaan negara lainnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak ikut serta menopang keuangan Negara. Dalam konteks pendidikan tinggi. perguruan tinggi negeri yang telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian PNBP secara fleksibel guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan operasional institusi.

2.4 Pengelolahan Keuangan Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Anisa, 2025). Badan Layanan Umum merupakan lembaga yang dibentuk guna memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta praktik bisnis yang sehat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini memungkinkan pendapatan operasional dapat digunakan langsung sesuai Rencana Bisnis dan Anggarannya, tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Negara. PPK-BLU diharapkan dapat menjadi langkah baik dalam reformasi keuangan negara menjadi penganggaran berbasis kinerja, seperti yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pembaharuan manajemen keuangan sektor publik ini diharapkan dapat memenuhi tujuan diadakannya BLU, yaitu untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Putriyana, 2018).

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memperlihatkan orisinalitas penelitian ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang terdapat kesamaan masalah dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai pembanding akan tingkat orisinalitas dari penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Amany, Dkk. (2020) “Peran Pendapatan dan Ukuran BLU terhadap Akreditasi BLU Pendidikan” menilai bagaimana pendapatan dan besar kecilnya sebuah BLU memengaruhi kualitas lembaga yang tercermin melalui akreditasi. Fokusnya pada hubungan variabel keuangan dan kelembagaan dalam lingkup banyak BLU pendidikan di Indonesia. Sedangkan penelitian “Analisis Realisasi PNBP pada BLU Universitas Pattimura” hanya berfokus pada evaluasi capaian penerimaan PNBP di satu institusi saja, tanpa mengaitkannya dengan akreditasi. Penelitiannya bersifat deskriptif dan lebih sempit ruang lingkupnya. Dengan demikian, penelitian pertama bersifat komparatif dan luas, sementara penelitian ini bersifat evaluatif dan spesifik.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Adhitama & Josua (2021) *“Analisis Realisasi PNBP pada BLU Politeknik Keuangan Negara STAN”* berfokus pada realisasi pendapatan dari layanan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara, dengan sumber PNBP utama berupa biaya pendidikan, pelatihan, dan layanan keuangan. Kajian ini menekankan efektivitas pengelolaan pendapatan dalam mendukung operasional pendidikan vokasi yang sangat spesifik pada sektor keuangan negara. Sementara itu, penelitian *“Analisis Realisasi PNBP pada BLU Universitas*

Pattimura" meneliti realisasi PNBP pada perguruan tinggi umum dengan sumber pendapatan yang lebih beragam, seperti UKT, Kerja Sama Penelitian, Pengelolahan asset dan Layanan Jasa Giro. Fokus analisis diarahkan pada pencapaian target, stabilitas pendapatan, serta kontribusi PNBP terhadap peningkatan layanan pendidikan tinggi secara lebih luas. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada jenis institusi pendidikan**,** jenis layanan yang menjadi sumber PNBP, dan fokus analisis realisasi pendapatan.

Penelitian ke tiga Dewi, dkk. (2024) Penelitian tentang Efektivitas PNBP di PPNP Palabuhan ratu dan Realisasi PNBP pada BLU Universitas Pattimura sama-sama menilai kinerja penerimaan PNBP melalui perbandingan target dan realisasi. Keduanya juga bertujuan melihat faktor-faktor yang memengaruhi capaian penerimaan. Perbedaannya terletak pada konteks lembaga dan sumber pendapatan. PPNP Palabuhanratu menitik beratkan pada efektivitas PNBP dari layanan kepelabuhanan dan aktivitas perikanan sebagai instansi non-BLU, sedangkan BLU Universitas Pattimura berfokus pada realisasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan dukungan analisis kualitatif. Data keuangan (laporan realisasi PNBP BLU Universitas Pattimura) dianalisis untuk melihat tren, capaian target, dan kontribusi tiap sumber penerimaan. Sementara itu, wawancara dengan pengelola PNBP digunakan untuk memahami faktor penghambat maupun pendukung pencapaian. Pemecahan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan target–realisasi, menganalisis penyebab fluktuasi, serta merumuskan strategi optimalisasi. Upaya perbaikan difokuskan pada diversifikasi sumber penerimaan, peningkatan sistem monitoring, dan penguatan tata kelola sesuai regulasi BLU. Pemilihan informan atau subjek penelitian dilakukan dengan cara *purposive*. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam, sedangkan data skunder diperoleh dari laporan realisasi anggara Universitas Pattimura tahun anggaran 2021 s.d. 2024. Peneliti menggunakan teknik triangulasi metode di mana triangulasi pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi (laporan keuangan). Triangulasi metode dilakukan untuk memperoleh kesinambungan data yang berasal dari metode wawancara dan dokumentasi (Zulfikar dan Masni, 2021). Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber dengan melakukan konfirmasi kepada pejabat keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan PNBP BLU di Universitas Patimura.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Realisasi PNBP BLU Jasa Layanan Pendidikan Universitas Pattimura

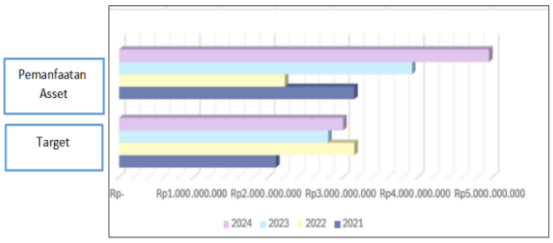


Gambar 1. Diagram Realisasi PNBP Jasa Layanan Pendidikan

Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan salah satu pembiayaan metode yang diterapkan bagi mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Biaya kuliah tunggal adalah total biaya operasional Biaya kuliah per

semester untuk mahasiswa program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya operasional pendidikan mempunyai peranan yang krusial dalam mendorong kemajuan pendidikan. Berdasarkan diagram diatas terlihat bahwa tren PNBP Jasa Layanan Pendidikan realisasi PNBP Universitas Pattimura periode 2021–2024 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 kondisi realisasi mencapai 4,34% . progres ini terus berkembang pada tahun 2022 mencapai 3,72% walaupun presentasenya tidak melewati realisasi tahun 2021 namun tetap melewati target anggaran yang ditentukan. selanjutnya pada tahun 2023 realisasi dari jasa pelayanan pendidikan mencapai sebesar 5,94% dan pada tahun 2024 pencapaian realisasi Jasa Layanan Pendidikan meningkat lebih tinggi sehingga mencapai 14,18%. Kenaikan Target PNBP meningkat tiap tahun dari Rp148,55 miliar (2021) menjadi Rp165 miliar (2024), mencerminkan adanya perencanaan peningkatan pendapatan secara bertahap. Pada semua tahun, realisasi melampaui target. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan perencanaan target yang relatif konservatif. Selisih terbesar antara target dan realisasi terjadi pada 2024, dengan capaian 14,18% di atas target. Ini menandakan peningkatan signifikan, baik dari sisi jumlah mahasiswa, efektivitas pembayaran UKT, maupun pengelolaan sistem penerimaan untuk Jasa Layanan Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapat informasi dari Kepala Unit Pengelola UKT (2025) yang mejelaskan bahwa penentuan UKT di Universitas Pattimura dilakukan melalui sistem pengelompokan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, yang dinilai dari data penghasilan, pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan, serta kondisi sosial-ekonomi lainnya. Data tersebut diverifikasi agar penetapan UKT adil dan sesuai kebijakan universitas serta batas tarif pemerintah. UKT menjadi penyumbang terbesar PNBP, yaitu lebih dari 90% pada periode 2021–2024, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran. Universitas memberikan opsi keringanan atau penjadwalan ulang, terutama bagi mahasiswa akhir, namun tetap mewajibkan pelunasan sebelum pengajuan ujian. Selain UKT, hasil wawancara dari Sub Koordinator PNBP menjelaskan bahwa Jasa Layanan Pendidikan juga mencakup pembayaran KKN, seminar, ujian skripsi/tesis/disertasi, dan wisuda. Ditegaskan lagi bahwa Universitas berkomitmen memperkuat verifikasi kemampuan ekonomi dan meningkatkan ketepatan penagihan agar kontribusi PNBP tetap optimal.

4.2 Realisasi PNBP BLU Pemanfaatan Aset Universitas Pattimura

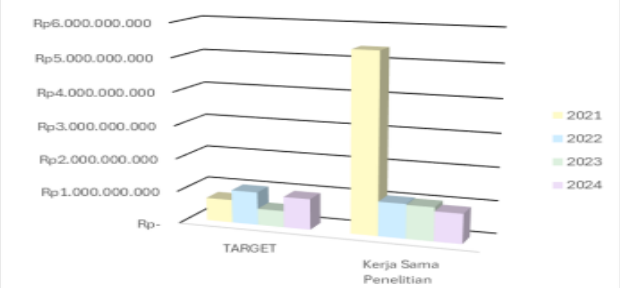


Gambar 2. Diagram Realisasi PNBP BLU Aset Universitas Pattimura

Berdasarkan data dari Gambar 2 terlihat bahwa tren PNBP Optimalisasi Aset realisasi Universitas Pattimura periode 2021–2024 terjadi peningkatan dan juga penurunan. Pada tahun 2021 kondisi realisasi mencapai 49,59% menunjukkan pencapaian yang sangat baik karena realisasi hampir 50% lebih tinggi dari target. Berbeda dengan tahun 2021, pada tahun 2022 realisasi untuk optimasisasi asset terlihat menurun sehingga menjadi -29,57% terjadi penurunan signifikan, dengan realisasi tidak mencapai target (defisit hampir 30%). pada tahun 2023 optimalisasi asset kembali meningkat tajam, melampaui target hingga 40%, mencerminkan adanya pemanfaatan aset yang lebih baik sehingga mengalami peningkatan presentase 2023 sebesar 40,08%. dan pada tahun 2024 kembali dilihat peningkatan yang drastis karena mencapi 65,12%, ini merupakan Capaian tertinggi ada pada tahun 2024, dan ini menandakan bahwa potensi pemanfaatan aset semakin dimaksimalkan. Secara umum, pemanfaatan aset sebagai sumber

PNBP memperlihatkan tren yang fluktuatif namun positif. Meskipun tahun 2022 terjadi penurunan realisasi, pada tahun-tahun berikutnya (2023 dan 2024) terjadi lonjakan yang signifikan. Capaian tertinggi ada pada tahun 2024, menandakan bahwa potensi pemanfaatan aset semakin dimaksimalkan. Berdasarkan hasil wawancara: Pengelolaan aset Universitas Pattimura menyatakan bahwa pengelolaan aset pada dasarnya telah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Pengelola Aset, dijelaskan bahwa berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, baik dalam pemanfaatan maupun pemantauan aset, sehingga capaian pengelolaan tetap sesuai dengan target yang ditetapkan universitas. Universitas Pattimura juga memiliki potensi besar dalam peningkatan PNBP mengingat keberagaman aset yang dimiliki, seperti gedung, lahan, dan unit-unit usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Meskipun sistem pengelolaan aset saat ini masih dilakukan secara manual, unit pengelola telah merencanakan pengembangan sistem informasi aset untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset secara lebih maksimal sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan universitas di masa mendatang.

4.3 Realisasi PNBP BLU Kerja Sama Penelitian



Gambar 3. Diagram Realisasi PNBP BLU Kerjasama Penelitian

Tren PNBP Kerja Sama Penelitian Universitas Pattimura periode 2021–2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Tahun 2021 mencatat capaian sangat tinggi dengan realisasi lebih dari enam kali lipat target, diduga karena adanya kerja sama penelitian berskala besar. Pada 2022 realisasi menurun namun tetap stabil, meski jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali, dengan realisasi melampaui target sebesar 104,21%. Sementara itu, pada 2024 terjadi penurunan kinerja karena realisasi berada sedikit di bawah target, sehingga menjadi satu-satunya tahun dalam periode ini ketika target tidak tercapai. Pejabat pengelolah menjelaskan Kerja sama penelitian di Universitas Pattimura dilaksanakan melalui kolaborasi dengan berbagai mitra pemerintah, swasta, maupun lembaga internasional, meliputi penelitian bersama, hibah riset, dan program pengabdian berbasis riset. Kontribusinya terhadap PNBP masih relatif kecil, namun memiliki nilai strategis karena memperkuat kualitas riset dan reputasi akademik universitas. Fluktuasi penerimaan terutama dipengaruhi peluang hibah, kualitas proposal, dan tingkat kompetisi pendanaan. Penerimaan yang meningkat pada tahun tertentu biasanya terkait keberhasilan memperoleh hibah berskala besar. Untuk meningkatkan kinerja, universitas mendorong penguatan kapasitas peneliti, memperluas jejaring kerja sama, serta mengoptimalkan pusat riset yang ada. Mekanisme kerja sama dilakukan sesuai ketentuan BLU, melalui tahapan penyusunan proposal, negosiasi, penandatanganan dokumen resmi, hingga pengelolaan dana melalui rekening universitas. Seluruh proses dimonitor oleh LPPM dan unit keuangan agar akuntabilitas dan kontribusi terhadap PNBP tetap terjaga.

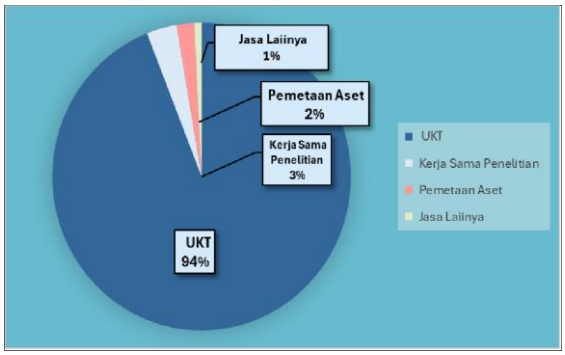
4.4 Realisasi PNBP BLU Jasa Layanan Perbankan BLU



Gambar 4. Diagram Realisasi PNBP BLU Jasa Layanan Perbankan BLU

Berdasarkan Gambar 4 diagram tren PNBP dari Jasa Layanan Perbankan menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung positif, di mana realisasi penerimaan setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan. Kinerja paling menonjol terjadi pada tahun 2024, ketika realisasi mencapai lebih dari tiga kali lipat target, mencerminkan potensi penerimaan yang cukup besar meskipun penetapan target antarperiode belum sepenuhnya konsisten. Hasil wawancara bersama Bendahara Penerimaan Universitas Pattimura, 2025 mengungkapkan bahwa penerimaan jasa perbankan, khususnya jasa giro dan bunga deposito, bersifat rutin dan relatif aman, namun sangat dipengaruhi oleh saldo kas yang mengendap di rekening serta tingkat suku bunga perbankan. Dinamika penggunaan dana untuk kegiatan operasional menyebabkan saldo kas dan penerimaan jasa giro berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun kontribusinya terhadap total PNBP relatif lebih kecil dibandingkan sumber penerimaan lainnya, jasa layanan perbankan tetap memiliki peran penting sebagai penopang keberlanjutan PNBP karena sifatnya yang stabil dan berisiko rendah. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan kas dan pemanfaatan peluang suku bunga yang menguntungkan menjadi langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi penerimaan dari sektor ini ke depan.

4.5 Kontribusi Sumber Realisasi Penerimaan Bukan Pajak Universitas Pattimura



Gambar 5. Diagram Kontribusi Realisasi PNBP Universitas Pattimura

Komposisi PNBP Universitas Pattimura tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa Jasa Layanan Pendidikan terutama UKT menjadi kontributor terbesar dengan porsi 94%. Adapun sumber PNBP lainnya masih relatif kecil, yaitu Kerja Sama Penelitian 3%, Pemetaan Aset 2%, dan Jasa Layanan Perbankan 1%. Dominasi ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan universitas masih bertumpu pada UKT, sementara potensi dari kerja sama penelitian, pemanfaatan aset, dan layanan lainnya masih dapat terus dioptimalkan untuk memperkuat kemandirian pendapatan universitas di masa mendatang.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka diharapkan Universitas Pattimura perlu memperkuat strategi optimalisasi penerimaan PNBP melalui diversifikasi sumber pendapatan,

khususnya pada sektor kerja sama penelitian, pemanfaatan aset, dan layanan non-UKT agar ketergantungan terhadap UKT dapat berkurang. Pengembangan sistem pengelolaan aset dan jasa layanan yang lebih terintegrasi penting untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi pemantauan, dan transparansi pengelolaan. Selain itu, peningkatan kapasitas dosen dalam memperoleh hibah penelitian, perluasan jaringan kemitraan, serta pengembangan unit bisnis universitas dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kontribusi PNBP non-UKT secara lebih signifikan. Universitas juga diharapkan terus memperbaiki mekanisme verifikasi kemampuan ekonomi mahasiswa agar penetapan UKT tetap adil dan tidak memberatkan, sambil menjaga stabilitas penerimaan. Dengan upaya yang berkelanjutan dan penguatan tata kelola, diharapkan kinerja PNBP Universitas Pattimura semakin optimal dan mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Pattimura periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja penerimaan secara umum menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi PNBP secara konsisten melampaui target anggaran, terutama pada pos Jasa Layanan Pendidikan, yang didominasi oleh penerimaan UKT dengan kontribusi rata-rata mencapai 94% dari total PNBP. Sistem pengelolaan UKT telah berjalan dengan mekanisme verifikasi dan pengelompokan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, meskipun masih terdapat tantangan berupa keterlambatan pembayaran, piutang mahasiswa tingkat akhir, serta koordinasi data antarunit. Sumber PNBP lainnya seperti kerja sama penelitian, pemanfaatan aset, dan jasa layanan perbankan juga memberikan kontribusi, meskipun porsinya masih relatif kecil. Fluktuasi pada kerja sama penelitian dipengaruhi oleh peluang hibah, kualitas proposal, serta tingkat kompetisi nasional. Sementara itu, pemanfaatan aset menunjukkan potensi besar, namun masih memerlukan penguatan sistem pengelolaan untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan. secara keseluruhan, PNBP Universitas Pattimura telah menunjukkan tren positif dengan potensi pengembangan yang masih sangat besar, terutama pada sektor kerja sama penelitian dan pemanfaatan aset.

6. DAFTAR PUSTAKA

Annisa, K., Maulana, S., Fadia, A., M. G. Fahluzi F Y (2025). Analisis Pengelolaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Pendekatan Teoritis dan Implikasi Audit Berbasis Risiko. HEMAT: Journal of Humanities. file:///C:/Users/ACER/Downloads/1.%20juernal%20pwnwlitian/6.%20Anisa%202025.pd

Amany, ST. (2020). Peran Pendapatan Dan Ukuran Badan Layanan Umum Terhadap Akreditasi Badan Layanan Umum Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. II No.1 (2020). https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article /view/1004/516

Ditisrama, L. Rinaulah., Sinaulan, R.L., Ismail (2022). Fungsi B*udgetary* dan R*egulatory* Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Di Indonesia. Vol.4, No6, Juni 2022. https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1897/1230

Faisal Akbar, Laylan Syafina. (2023). "Analisis Pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan." Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 7 No. 1, Maret 2023.

John Mutinda Mutiso1, Prof. Maria Onyango2, Dr. Michael Nyagol (2015) *Effects of Funding Sources on Access to Quality Higher Education in Public Universities in Kenya: A Case Study. International Journal of Business and Social Research Volume 05, Issue 03, 2015,*

Rusdi, D. R. (2021). Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendapatan dan Belanja Negara. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5(1): 77-85. http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v5i1.1645

Supryanto, D. (2023). *Quality of public services in the field of population administration in malangpublic administrative mall.* JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 4, 2023, pp. 606-613 DOI: https://doi.org/10.29210/020233177

Suparman, N. 2017. Pengaruh Implementasi Kebijakan Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Kinerja Auditor pada Pusat Pengembangan Penataran Guru IPA Kota Bandung. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan 3(1): 1 12. https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1326

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Putriyana, L., Ladiba, F., Nafis, S., & Soekarno. H (2018). Potensi dan Tantangan Badan Layanan Umum di Bidang Penelitian dan Pengembangan Panas Bumi. Kajian Ekonomi Keuangan Vol. 2 No. 2 (2018)

Putri, T.D (2021*).* Non-Tax State Revenue (PNBP) In Research Institute For Inland Fisheries And Extensi on BRPPUPP. Journal Management, Business, and Accounting p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-8262 Vol. 20, No. 2, Agustus 2021file:///C:/Users/barne/Downloads/mmbia,+1458-Article+Text-3211-1-15-20211006+Tike+Dwi+Putri+edited+new.pdf

Wardatul Jannah*, Kaspul Anwar Us, Fridiyanto Fridiyanto, (2025). Global Issues in Budgeting and Financing Systems (RM, BLU, and UKT) for World-Class Education: A Case Study a UIN SUKA Yogyakarta. Vol.1,No.2(2025) https://journal.futuretechnoscience.com/index.p/ideal/article/view/36/38